

BAB I **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- E. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan , belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. NERACA.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang

- termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan priode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila deficit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus / deficit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada priode-priode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiscal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-trasaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- i. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- j. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah ;
- k. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
- m. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2014 tentang system akuntansi pemerintah daerah,;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 7 (tujuh) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.
- BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.
- BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- BAB V : Penutup

BAB II

NO	URAIAN	TARGET		HASIL		%	
		KELUAR AN	KEUANGAN	KELUAR AN	KEUANGAN	KINERJA	KEUANG AN
B.	BELANJA DAERAH	100,00	100.020.581,653,00	(rata rata akumulasi persentase kinerja program)	74.406.260,451,50	hasil keluaran/tarjet keluaran X100%	74,39%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	38.278.920.637,00	95,28%	34.612.687.090,00	95,28%	90,42%
		100%		100%		100,00%	
		10,53%		69,20%		657,17%	
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.089.191.000,00	7 Dokumen	1.374.838.743,00	100%	65,81%
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 1374838743,					
	Keluaran	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Hasil	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja tepat Waktu					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	571.811.800,00	15 Dokumen	241.084.638,00	100%	42,16%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena Rakor pembangunan kelautan dan perikanan Rp 100.000.000 tidak dilaksanakan karena SPD tidak terbit dan kegiatan studi tiru tidak jadi realisasi karena hutang, Pengadaan Printer Pengelola Data Perencanaan 4 unit Rp 19.375.000 tidak terealisasi SPD tidak terbit							
1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31 Dokumen	14.223.100,00	31 Dokumen	11.338.000,00	100%	79,72%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisinesi belanja kertas dan cover serta belanja bahan cetak DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							

1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30 Dokumen	16.214.300,00	30 Dokumen	12.190.000,00	100%	75,18%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena ada beberapa belana perjadin tidak masuk realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30 Dokumen	17.918.000,00	30 Dokumen	15.908.200,00	100%	88,78%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjadin dalam kota DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30 Dokumen	28.673.500,00	30 Dokumen	25.693.000,00	100%	89,61%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjadin biasa DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	1.425.067.500,00	10 Laporan	1.055.310.105,00	100%	74,05%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena Pengadaan Alat Pengelola Data Statistik Printer Rp 5.000.000 tidak terealisasi karean SPD tidak terbit, sisa Belanja Honor moderator 2 OK Rp 1.000.000							
1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	15.282.800,00	12 Laporan	13.314.800,00	100%	87,12%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjadin DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Laporan	25.157.399.114,00	56 Laporan	24.865.946.001,00	100%	98,84%
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 24865946001,					
Keluaran		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					
Hasil		Tersedianya Laporan administrasi keuangan OPD yang tepat waktu					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/Bulan	25.021.349.114,00	182 Orang/Bulan	24.734.155.601,00	100%	98,85%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							

1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.432.200,00		2.222.400,00	100%	91,37%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.529.800,00	12 Dokumen	3.329.500,00	100%	94,33%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.405.000,00	1 Laporan	6.145.000,00	100%	95,94%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	35.770.000,00	1 Dokumen	33.799.750,00	100%	94,49%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena Makan dan Minum dalam rangka Koordinasi Bahan dan Laporan Pemeriksa Rp 1.650.000.000 tidak terlaksana karena dilaksanakan dengan Intern Dinas dan Efisiensi belanja transport dalam rangka Koordinasi Bahan dan Laporan Pemeriksa Rp 260.000							
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	87.913.000,00	18 Laporan	86.293.750,00	100%	98,16%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	89.224.150,00	3 Laporan	86.952.150,00	100%	97,45%
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 86952150,					
Keluaran		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya Laporan administrasi Barang Milik Daerah					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.690.700,00	1 Dokumen	2.690.700,00	100%	100,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	80.073.450,00	1 Dokumen	79.786.450,00	100%	99,64%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							

1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6.460.000,00	1 Laporan	4.475.000,00	100%	69,27%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjadin biasa DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	30.040.000,00	1 Laporan	30.015.000,00	100%	99,92%
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 30015000,					
Keluaran		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah					
Hasil		Tersedianya Laporan Administrasi pendapatan OPD					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.040.000,00	1 Dokumen	30.015.000,00	100%	99,92%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	425.929.100,00	80 Persen	357.791.170,00	80,00%	84,00%
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 357791170,					
Keluaran		Jumlah Layanan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya layanan administrasi Kepegawaian					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	23.780.000,00	0 Unit	13.235.000,00	0%	55,66%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN keluaran kurang dari target karena pengadaan mesin absensi finger print Rp 8.100.000 tidak terlaksana karena SPD tidak terbit							
1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	385 Pasang	333.610.000,00	385 Pasang	286.363.000,00	100%	85,84%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja pakaian dinas harian dan pakaian korpri (sisa kontrak) DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.246.000,00	12 Dokumen	4.725.070,00	100%	90,07%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.202.400,00	12 Dokumen	5.502.400,00	100%	88,71%

KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja cetak DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	57.090.700,00	12 Dokumen	47.965.700,00	100%	84,02%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjadin DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.389.977.330,00	87,5 Persen	1.560.094.960,00	87,50%	65,28%
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 1560094960,					
Keluaran		Jumlah layanan Administrasi Administrasi Umum perangkat Daerah					
Hasil		Tersedianya layanan administrasi umum OPD					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	37.658.600,00	10 Paket	34.203.200,00	100%	90,82%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Paket	1.102.571.930,00	20 Paket	523.642.718,00	66,67 %	47,49%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN keluaran kurang dari target karena di unit kerja Sekretariat terdapat AC 4 unit Rp 29.000.000, Laptop 2 unit Rp 32.000.000, Printer 1 unit Rp 18.500.000 SPD tidak terbit, CDK Ajatappareng 1 unit Laptop Rp 15.000.000 karena SPD tidak tersedia, CDK Bosowasi 1 unit Laptop Rp 22.358.700 SPD tidak tersedia, PBAPL 1 unit AC Rp 5.848.500 tidak terlaksana karena SPD tidak tersedia							
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	243.072.000,00	10 Paket	221.394.100,00	100%	91,08%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30 Paket	106.553.000,00	30 Paket	97.673.800,00	100%	91,67%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	95.765.000,00	12 Laporan	62.770.500,00	100%	65,55%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% CDK Selayar Fasiltasi kunjungan tamu Rp 5.968.500 tidak dilaksanakan karena tidak ada yang memenuhi persyaratan SPJ dan efisiensi makan minum rapat unit kerja							
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	801.087.800,00		617.141.642,00	100%	77,04%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja makan minum dan belanja perjadin biasa sebagian tidak masuk realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.269.000,00	1 Dokumen	3.269.000,00	100%	100,00%

KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Unit	146.102.360,00	7 Unit	19.634.000,00	58,33%	13,44%
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 19634000,					
	Keluaran	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah yang tersedia					
	Hasil	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan OPD					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.07.05	Pengadaan Mebel	11 Paket	46.102.360,00	7 Paket	19.634.000,00	63,64%	42,59%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN keluaran kurang dari target disebabkan 4 unit mebel tidak terealisasi karena SPD tidak terbit							

1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0,00	0,00%	0,00%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN keluaran kurang dari target karena aplikasi nelayan tidak dilaksanakan karena SPD tidak terbit							
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	5.472.700.939,00	4 Jenis	5.206.627.828,00	100%	95,14%
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 5206627828,					
	Keluaran	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Hasil	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang urusan OPD					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	947.419.723,00	12 Laporan	824.574.563,00	100,00%	87,03%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% efisiensi belanja air listrik dan internet DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	4.525.281.216,00		4.382.053.265,00	100,00%	96,83%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 Unit	2.478.356.644,00	48 Unit	1.110.787.238,00	96,00%	44,82%
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 1110787238,					
	Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.					
	Hasil	Tersedianya barang milik daerah dalam kondisi baik.					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					

Lokasi		Kota Makassar					
1.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	1.238.110.944,00	17 Unit	661.017.892,00	100,00 %	53,39 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja sewa kendaraan perorangan tidak masuk realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	141.545.700,00	29 Unit	116.730.090,00	100,00 %	82,47 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja bahan bakar dan pajak kendaraan DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.09.0 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	129.000.000,00	1 Unit	79.000.000,00	100,00 %	61,24 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja software tidak masuk realisasi dan jadi utang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	969.700.000,00	1 Unit	254.039.256,00	33,33 %	26,20 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN keluaran kurang dari target karena pemeliharaan ruang laktasi Rp 75.000.00-, LONGUE DAN FRONT OFFICE Rp 206.000.000, Rehab Ruang Pimpinan Rp 206.000.000, Rehabilitasi Toilet Kantor Lantai 1 dan Lantai 2 Rp 154.500.000, Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Pagar BBI Lajoa disebabkan waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan							
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	100%	13.535.671.100,00	56,57%	8.838.269.191,00	56,75%	65,30 %
		48.450 ton		114.959 ,88 ton		237,28	
		67,31%		68,09%		101,16	
1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	30 Unit	12.198.683.100,00	27 Unit	8.668.070.331,00	90,00%	71,06 %
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 8668070331,					
Keluaran		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi, Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana pengelolaan ruang laut dan kawasan konservasi yang direhabilitasi					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kab. Sinjai; Kab. Takalar; Kab. Wajo; Kab. Bantaeng; Kab. Palopo; Kab. Luwu Timur; Kota Makassar; Kab. Barru; Kab. Bone; Kab. Bulukumba; Kab. Jeneponto; Kab. Luwu; Kab. Luwu Utara; Kab. Maros; Kab. Pangkajene Kepulauan; Kab. Pinrang; Kab. Kepulauan Selayar					
1.01.0 2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	578.435.53 Ha	992.410.000,00	578.435.53 Ha	254.543.941,00	100%	25,65 %

	Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena Bimbingan teknis mitigasi pesisir dan temu koordinasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi (Rp 121.702.000) tidak terlaksana karena SPD tidak terbit dan Aplikasi pengembangan data based mangrove MONTERE Rp 200.000.000 tidak terlalisasi karena SPD terlambat terbit							
1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	84.7 Ha	11.206.273.100,00	84.7 Ha	8.413.526.390, 00	100%	75,08 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG dari target karena unit kerja CDK Selayar transplantasi karang Rp 185.000.000 SPD tidak terbit , tambatam perahu Rp 206.000.000 SPD terlabat terbit sehingga waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan, CDK Ajatappareng : transplantasi karang Rp 185.000.000 SPD tidak terbit							
1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	12 Rekomend asi	1.830.000,00	4 Rekomend asi	100,00	100%	0,00 %
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 100,					
Keluaran		Jumlah Dokumen teknis pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi					
Hasil		Tersedianya dokumen teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang laut					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		-					
1.02.0 2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	12 Rekomend asi	1.830.000,00	4 Rekomend asi	33,33	100,00 %	0,00 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Unit	1.335.158.000,00	5 Unit	170.198.860,00	50,00%	12,75 %
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 170198860,					
Keluaran		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana di wilayah pesisir dan pemberdayaan masyarakat pesisir					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kab. Jeneponto; Kab. Maros; Kab. Pangkajene Kepulauan; Kab. Kepulauan Selayar; Kab. Takalar; Kota Makassar					
1.03.0 1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	60 Orang	634.465.000,00	50 Orang	124.714.000,00	83,33 %	19,66 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena Kelompok Usaha Garam Rakyat Tampaang Tiga Desa Kec Liukang Tangaya Kab Pangkep Sarana Inovasi Garam Rp 100.000.000 karena SPD tidak terbit							
1.03.0 2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir	4 Kelompok	673.050.000,00	0 Kelompok	29.644.000,00	0%	4,40 %

	dan Pulau-Pulau Kecil						
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena Sarana prasarana usaha garam rakyat (gudang garam) 4 kelompok dengan pagu Rp 642.000.000 tidak terealisasi karena SPD terlambat terbit							
1.03.0 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12 Kelompok	27.643.000,00	12 Kelompok	15.840.860,00	100,00 %	57,31 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjalanan dinas DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	413.030,8 Ton	37.410.867.789,00	492.159 ,50	25.347.693.829 ,00	119,16 %	67,75 %
		Rp 9.210,12 M		13.284, 55		144,24 %	
		78,95 %		89,47%		113,32 %	
1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	498 Unit	13.675.717.000,00	495 Unit	5.814.984.200, 00	99,40	42,52 %
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 5814984200,					
Keluaran		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil					
Hasil		Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di laut dan terbinanya nelayan					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kab. Sinjai; Kab. Takalar; Kab. Wajo; Kab. Bantaeng; Kab. Palopo; Kab. Luwu Timur; Kota Makassar; Kab. Baru; Kab. Bone; Kab. Bulukumba; Kab. Jeneponto; Kab. Luwu; Kab. Luwu Utara; Kab. Maros; Kab. Pangkajene Kepulauan; Kab. Pinrang; Kab. Kepulauan Selayar					
1.01.0 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	18 Unit	7.626.421.000,00	18 Unit	3.338.156.000, 00	100,00 %	43,77 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja barang ke masyarakat tidak masuk realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.01.0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	480 Unit	6.049.296.000,00	477 Unit	2.476.828.200, 00	99,38	40,94 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena belanja barang ke masyarakat tidak masuk realisasi dan jadi hutang serta tidak direalisasikannya belanja personal komputer DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	2 Unit	206.914.000,00	2 Unit	5.880.000,00	100,00	2,84%

	yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 5880000,					
	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan					
	Hasil	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan penangkapan ikan di PUD dan terbinanya nelayan					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Kab. Enrekang; Kab. Gowa; Kab. Sidenreng Rappang; Kab. Soppeng; Kab. Wajo					
1.02.0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2 Unit	206.914.000,00	2 Unit	5.880.000,00	100,00 %	2,84%
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena tidak dilaksanakannya pekerjaan belanja barang ke masyarakat karena belum spd DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomenda si	18.389.800,00	484 Rekomenda si	16.284.800,00	484,00%	88,55 %
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 16284800,					
	Keluaran	Jumlah rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					
	Hasil	Tersedianya rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	-					
1.03.0 2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomenda si	18.389.800,00	484 Rekomenda si	16.284.800,00	484,00	88,55 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjalanan dinas DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7 Unit	23.509.846.989,0 0	7 Unit	19.510.544.829,0 0	100%	82,99 %

	Provinsi						
Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 19510544829,						
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola						
Hasil	Tersedianya sarana prasarana dan terkelolanya pelabuhan perikanan						
Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi	Kota Makassar						
1.06.0 1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5 Pelabuhan Perikanan	64.100.000,00	5 Pelabuhan Perikanan	51.830.000,00	100,00 %	80,86 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjalanan dinas DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06.0 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	10 Unit	23.243.396.389,00	10 Unit	19.269.171.999,00	100,00 %	82,90 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya, belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya, pengadaan kontainer sampah PPI Beba Kab. Takalar, pengawasan rehabilitasi drainase PPI Birea Kab. Bantaeng, belanja modal pengadaan instalasi pengolah limba PPI Beba Kab. Takalar, belanja modal bangunan tempat pelelangan ikan PPI Bontobahari Kab. Bulukumba, pekerjaan fasilitas air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar, menara dan tank), peralatan dan mesin penunjang PNBP perikanan tangkap PPI Beba Kab Takalar dan PPI Birea Kab. Bantaeng (CCTV dan Keranjang), Rehab. Jalan kompleks PPI Maccini Baji Kab. Pangkep, pakaian dinas lapangan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 2, perencanaan rehabilitasi tempat pemasaran ikan PPI Kajang kab. Bulukumba, pengawasan pengadaan instalasi pengolah limba PPI beba, belanja modal bangunan tempat pelelangan ikan di PPI Lappa Kab. Sinjai, perencanaan pembangunan penahan gelombang (breakwater) di PPI beba Tahap II (Dua), pengawasan belanja modal bangunan tempat pelelangan ikan PPI lappa kab. Sinjai, pengawasan belanja modal bangunan tempat pelelangan ikan PPI Bontobahari Kab. Bulukumba, tidak masuk realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.06.0 3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	2 Layanan	202.350.600,00	2 Layanan	189.542.830,00	100,00 %	93,67 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.298.391, 1 ton	5.314.667.527,00	4.128.072. 6 Ton	1.861.833.577,00	96,04%	35,03 %
		Rp 15.958,39 M		Rp 18.157,92 M		113,78%	
		100%		112,58%		112,58%	
1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	548 Unit	3.037.416.000,00	464 Unit	960.390.200,00	84,67%	31,62 %

Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 960390200,						
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						
Hasil	Tersedianya sarana prasarana budidaya di laut						
Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi	Kab. Bantaeng; Kab. Bone; Kab. Jeneponto; Kab. Luwu; Kab. Luwu Utara; Kab. Maros; Kab. Pangkajene Kepulauan; Kab. Takalar; Kab. Wajo; Kab. Palopo						
1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	547 Unit	2.876.890.000,00	464 Unit	929.878.200,00	84,83	32,32%
<p>KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena KELOMPOK BINA BAHARI DESA MUNTE KEC. TANALILI KAB. LUWU UTARA Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket Rp 50.000.000 proposal tidak tersedia, KELOMPOK KATOJOA, KELOMPOK PRIMA KATOJOA, KELOMPOK SAHABAT BAHARI KEC. LABAKKANG KAB. PANGKEP Sarana Budidaya Rumput Laut 30 paket Rp 150.000.000 SPD tidak tersedia, Kelompok Masagenae Kec Sajoang Kabupaten Wajo Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket Rp 50.000.000 terdaftar penerima bantuan dari pusat, KELOMPOK PASI TELLUE, KELOMPOK BUNGA KARANG DESA MUNTE KEC. TANALILI KAB. LUWU UTARA Sarana Budidaya Rumput Laut 50 Paket Rp 150.000.000 ada sisa paket sebanyak 4 paket x 5.000.000, Pokdakan Benna'e Desa Cege Kec. Mare Kab Bone Sarana Budidaya 19 paket Rp 95.000.000 SPD terlambat terbit sehingga waktu tidak mencukupi untuk pengadaan</p>							
1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.006.000,00	0 Unit	0,00	0,00%	0,00%
<p>KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena tidak dilaksanakannya belanja bahan bibit ikan DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET Pengadaan Operasional Budidaya KJA Rp 50.006.000 adanya pergantian pejabat (KPA) di unit kerja sehingga pekerjaan mundur dari waktu yang ditetapkan dan berjalan di akhir tahun sehingga waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan</p>							
1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	47.840.000,00	8 Dokumen	30.512.000,00	100,00%	63,78%
<p>KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena efisiensi belanja perjalanan dinas</p>							
1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	30 Orang	62.680.000,00	0 Orang	0,00	0,00%	0,00%
<p>KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG DARI TARGET karena kegiatan tidak dilaksanakan disebabkan SPD tidak terbit</p>							
1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	11 Unit	2.277.251.527,00	11 Unit	901.443.377,00	100%	39,58%

Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 901443377,						
---------	---	--	--	--	--	--	--

Keluaran		Jumlah sarana dan prasana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar					
Hasil		Tersedianya sarana prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kab. Sinjai; Kab. Takalar; Kab. Wajo; Kab. Bantaeng; Kab. Palopo; Kab. Luwu Timur; Kota Makassar; Kab. Barru; Kab. Bone; Kab. Bulukumba; Kab. Jeneponto; Kab. Luwu; Kab. Luwu Utara; Kab. Maros; Kab. Pangkajene Kepulauan; Kab. Pinrang; Kab. Kepulauan Selayar					
1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	1.545.447.027,00	10 Unit	467.852.127,00	100,00%	30,27%
<p>KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena pengadaan mini bioflock kelompok doa restu kelurahan mangadukecamatan mangarabombang kab. Takalar, perencanaan rehabilitasi mess operator perbenihan di IPIAT Lajoa Soppeng, perencanaan rehabilitasi bak pendederan dan tandon di IPIAT Lajoa Soppeng, penyediaan pengadaan mini bioflock kelompok jabolasi desarawamangun kec. sukamaju selatan kab. luwu utara, pengadaan mini bioflock pokdakan buntu tanete lembang randanan kecamatan mengkendek kabupaten tana toraja, pegadaan mini bioflock kelompok sinar walanae desa barang kecamatan liliriaja kab. soppeng, penyediaan mini bioflock kelompok sappulo bioflock Desa Pinang kecamatan cendana kab. enrekang, pengadaan mini bioflock kelompok labattoa Desa Rijang Panua, kec. kulo Kab. Sidrap, pengadaan mini bioflock kelompok sarojah, kel. bumi harapan kecamatan bacukiki barat kota pare pare, pengadaan mini bioflock kelompok malaka putra kelurahan mattiropuli kec. Bengo kab. Bone, pengadaan mini bioflock kelompok jangkar, Desa Bungaejaya kec. Pallangga kab. Gowa, Pengadaan mini bioflock kelompok bonrongi desa tellumpanua kec. Suppa kab. Pinrang, DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET</p>							
1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	731.804.500,00	1 Unit	433.591.250,00	100,00%	59,25%
<p>KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena Pembayaran belanja penyediaan bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan untuk operasional perbenihan BBI Lajoa Soppeng di Kab. Soppeng, pengadaan sarana pendukung operasional perbeniham udang UPT PBAPL, tidak masuk realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET</p>							
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,85 %	3.627.801.000,00	56,35%	2.693.570.950,00	62,72%	74,25%

1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	9 Dokumen	3.589.696.000,00	9 Dokumen	2.656.547.450,00	100%	74,00%
-------------	---	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------	------	---------------

Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 2656547450,						
Keluaran	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil						
Hasil	Tersedianya sarana prasarana pengawasan dan unit usaha yang diawasi						
Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
Lokasi	Kab. Bone; Kab. Gowa; Kab. Luwu; Kab. Luwu Utara; Kab. Maros; Kab. Pangkajene Kepulauan; Kab. Kepulauan Selayar; Kab. Takalar; Kota Pare-Pare; Kota Makassar; Kota Palopo; Kab. Luwu Utara						
1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	77.555.100,00	1 Dokumen	75.024.134,00	100,00 %	96,74%

KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET

1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	3.275.470.900,00	7 Dokumen	2.349.238.316,00	100,00 %	71,72%
----------------	--	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------	----------	---------------

KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena pemeliharaan kapal pengawas CDK Kep. Selayar, baju lapangan pengawas Cabang Dinas kelautan Kep. Selayar, pengadaan perahu pokmaswas mojong sejahtera Kab. Sidrap, pengadaan perlengkapan pengawas SDKP (DAK) CDK Pangkep, Pengadaan perahu pokmaswas bambangan desa parak kecamatan bontomanai kab. Kep. Selayar, pengawasan perahu pokmaswas bambangan desa parak kec. Bontomanai kab. Kep. Selayar CDL Selayar, Pengawasan perahu pokmaswas kelompok pokmaswas nelayan danau tempe kab. Wajo , pengadaan perahu pokmaswas kelompok nelayan danau tempe kab. Wajo, belanja perjalanan dinas biasa tidak masuk di realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET

1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	17.830.000,00	7 Dokumen	17.830.000,00	100,00 %	100,00 %
----------------	--	-----------	----------------------	-----------	----------------------	----------	-----------------

KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET

1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	32 Kelompok	218.840.000,00	32 Kelompok	214.455.000,00	100,00 %	98,00%
----------------	--	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	----------	---------------

KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET

1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	3 Dokumen	38.105.000,00	3 Dokumen	37.023.500,00	100%	97,16%
-------------	--	-----------	----------------------	-----------	----------------------	------	---------------

	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
	Masukan	Dana yang direalisasikan Rp. 37023500,					
	Keluaran	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya					
	Hasil	Tersedianya sarana prasarana pengawasan dan unit usaha yang diawasi di perairan umum daratan					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	-					
1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.060.000,00	1 Dokumen	9.300.000,00	100,00 %	92,45 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.860.000,00	1 Dokumen	10.540.000,00	100,00 %	97,05 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	17.185.000,00	1 Dokumen	17.183.500,00	100,00 %	99,99 %

KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100%	1.852.653.600,00	88,03%	1.052.205.814,50	88,03%	56,79 %
		Rp 317.28 M					
		5.544,1 Ton					
1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	100 Unit Usaha	1.851.902.200,00	100 Unit Usaha	1.052.205.814,50	100%	56,82 %
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. 1052205814,5					
Keluaran		Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
Hasil		Tersedianya UMKM yang mendapatkan pembinaan mutu dan berdaya saing					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 Unit Usaha	451.092.200,00	10 Unit Usaha	192.827.060,00	100%	42,75 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena sarana pengolahan/pemasaran POKLAHSAR kelompok pemasaran layang kec. Soreang kota pare pare, belanja perjalanan dinas biasa tidak masuk realisasi dan jadi hutang DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							
1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	100 Unit Usaha	1.400.810.000,00	100 Unit Usaha	859.378.754,50	100%	61,35 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% karena pengadaan belanja modal alat laboratorium lain (Cool Incubator), belanja bahan kimia pengujian mikrobiologi dan kima, jasa audit/survailence ISO bahan pengujian laboratorium " akreditasi/survailence 17025, pengadaan belanja pemeliharaan alat-laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium lainnya, pengadaan belanja modal alat laboratorium lain, DAN KELUARAN KURANG ATAU LEBIH DARI TARGET							

1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	751.400,00	0 Laporan	0,00	0%	0,00 %
Masukan		Dana yang direalisasikan Rp. ,					
Keluaran		Jumlah laporan bahan baku Industri pengolahan ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan					
Hasil		Tersedianya laporan bahan baku industri pengolahan ikan lintasdaerah					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Kota Makassar					
1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	351.400,00	0 Dokumen	0,00	0%	0,00 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG TARGET karena alokasi anggaran ini untuk mendukung kegiatan APBN namun karena tidak dilaksanakan sehingga penyediaan dokumen tidak terealisasi							
1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	400.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0,00 %
KETERANGAN REALISASI KEUANGAN DIBAWAH 90% DAN KELUARAN KURANG TARGET karena tidak ada dukungan dana untuk melakukan pendataan distribusi ikan antar kabupaten							

1.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

capaian realisasi anggaran mencapai 74.39% dari pagu anggaran disebabkan adanya SPM yang tidak terbayarkan, kegiatan tidak dilaksanakan/tidak selesai, sisa pagu belanja kegiatan DAK, dan sisa belanja barang/jasa pagu kontrak.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah :

Untuk SPM yang tidak terbayarkan akan dikoordinasikan dengan pihak inspektorat untuk review kegiatan agar dapat dibayarkan di tahun 2023.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1.1 PENDAPATAN- LRA

TAHUN 2023			TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	
2.908.411.150,00	2.823.054.450,00	97.25	3,013,005,280.00

Pendapatan Daerah yang direncanakan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp. 2.908.411.150,00,- dapat direalisir sebesar Rp. 2.823.054.450,00,- atau 97.07%, Realiasi Pendapatan Daerah T.A.2023 turun dari realisasi T.A. 2022 sebesar Rp. 3,013,005,280.00 dan realisasi 2023 Rp. 2.823.054.450,00 jadi turun sebesar Rp. 189.950.830,00,- Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Target 2023	Realisasi	
			Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Retribusi daerah	2.908.247.750,00	2.822.767.650,00	2.978.487.780
2.	Lain – lain PAD yang Sah	163.400,00	286.800,00	34.517.500
Jumlah		2.908.411.150,00	2.823.054.450,00	3.013.005.280

3.1.2 BELANJA LRA

TAHUN 2023			TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	
100.020.581.653	74.406.260.451.50	74.39	74.350.572.447,00

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 100.020.581.653,00,- sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 74.406.260.451,50,- atau **74.39%** yang berarti terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 25.614.321.201,50,-

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi	
			Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Belanja Operasi	73.703.436.504,00	54.160.162.246,50	67.897.844.275
2.	Belanja Modal	26.317.145.149,00	20.246.098.205,00	6.452.728.172
Jumlah		100.020.581.653,00	74.406.260.451,50	74.350.572.447

3.1.2.1 Belanja Operasi

TAHUN 2023		%	TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI		
73.703.436.504,00	54.160.162.246,50	73.48	67.897.844.275

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 73.703.436.504,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 54.160.162.246,50 atau 73.48%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.543.274.257,50, Realisasi tersebut berkurang Rp. 13.737.682.029,- dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 67.897.844.275,-. Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi	
			Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Belanja Pegawai	25.021.349.114,00	24.734.155.601,00	22.533.006.538
2.	Belanja Barang	48.682.087.390,00	29.426.006.645,-	45.364.837.737
Jumlah		73.703.436.504,00	54.160.162.246,50	67.897.844.275

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai /Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

TAHUN 2023		%	TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI		
25.021.349.114,00	24.734.155.601,00	98.85	22.533.006.538

Belanja Pegawai/ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Kelautan Dan perikanan T.A. 2023 direncanakan sebesar Rp. **25.021.349.114,00,-** dapat direalisir sebesar Rp. **24.734.155.601,00,-** atau 98.85% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **287.193.513,00**. Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Gaji dan Tunjangan	12.749.196.097,00	13.229.134.359,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	11.984.959.504,-	9.303.872.179,00
Jumlah		24.734.155.601,00	22.533.006.538,00

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

TAHUN 2023		TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	
48.682.087.390,00	29.426.006.645,50	60.45
		45.364.837.737,00

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Bahan Pakai Habis	19.073.968.070,50	35.113.019.647
2	Belanja Jasa Kantor	5.698.709.353,00	6.027.583.063
3	Belanja premi asuransi	248.665.200,00	189.901.054
4	Belanja sewa peralatan dan mesin	245.229.992,00	
5	Belanja sewa gedung dan bangunan	4.000.000,00	18.000.000
6	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	3.064.018.495,00	2.724.339.265
7	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	472.133.508,00	170.179.000
8	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan		349.461.958
9	Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi	219.294.027,00	
10	Belanja jasa konsultasi konstruksi	200.000.000,00	599.649.750
11	Belanja jasa konsultasi non konstruksi	199.988.000,00	172.704.000
12	Belanja Barang yang Akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak ketiga		
Jumlah		29.426.006.645,50	45.364.837.737

Belanja Barang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan direncanakan sebesar Rp. 48.682.087.390,00.- dapat direalisir sebesar Rp. 29.426.006.645,50,- atau 60.45% terdapat sisa anggaran sebesar 19.256.080.744,50,- Realiasi T.A.2023 berkurang sebesar Rp. 15.938.831.092,- dari realisasi T.A. 2022 sebesar Rp. 45.364.837.737. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Bahan Pakai Habis

TAHUN 2023			TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	
35.633.513.280,00	19.073.968.070,50	53.53	35.113.019.647

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	199.236.397,50	
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.299.167.250,00	789.242.850,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	136.651.000,00	
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.986.568.810,00	3.787.113.590,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.945.784.580,00	7.182.218.065,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	69.807.500,00	836.521.920,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		259.950.882,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	377.992.371,00	397.218.666,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	111.294.719,00	
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	185.599.000,00	874.681.830,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.179.000,00	3.312.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	88.431.048,00	78.056.500,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	60.040.000,00	76.348.600,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	34.203.200,00	12.514.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sувенир/Cendera Mata	17.100.000,00	
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	186.916.100,00	222.232.000,00
17	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	43.876.000,00	770.000,00
18	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.309.204.950,00	19.206.165.434,00
19	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	447.133.145,00	1.123.336.000,00
20	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	62.770.500,00	45.608.500,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.400.000,00	82.078.810,00
22	Belanja Pakaian Olahraga		135.650.000,00
23	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	143.363.000,00	
24	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	189.249.500,00	
25	Belanja Pakaian KORPRI	143.000.000,00	
JUMLAH		19.073.968.070,50	35.113.019.647

BELANJA JASA KANTOR

TAHUN 2023			TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	
6.640.429.403,00	5.698.709.353,00	85.52	6.027.583.063

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	121.550.000,00	282.000.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.128.000.000,00	2.501.600.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.800.000,00	55.800.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	335.129.355,00	303.924.096,00
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	409.602.545,00	417.895.632,00
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	260.656.165,00	151.962.048,00
7	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	99.850.000,00	204.468.978,00
8	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik		3.000.000,00
9	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.000.000,00	
10	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	103.864.285,00	
11	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.000.000,0	
12	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	79.000.000,00	475.609.000,00
13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	199.800.000,00	457.917.129,00
14	Belanja Jasa Kalibrasi		71.429.000,00
15	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	800.000,00
16	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000,00	299.677.500,00
17	Belanja Tagihan Air	13.301.620,00	6.773.810,00
18	Belanja Tagihan Listrik	722.807.641,00	687.106.765,00
19	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	88.465.302,00	82.701.605,00
20	Belanja Paket/Pengiriman		1.680.000,00
21	Belanja Penambahan Daya	7.500.000,00	
22	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.482.440,00	23.237.500,00
JUMLAH		5.698.709.353,00	6.027.583.063

BELANJA PREMI ASSURANSI

TAHUN 2023			TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	
266.494.236,00	248.665.200,00	93.31	189.901.054

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	217.466.700,00	180.958.654,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13.866.000,00	3.974.400,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.332.500,00	4.968.000,00
	JUMLAH	248.665.200,00	189.901.054

BELANJA SEWA

TAHUN 2023		TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	
768.292.244,00	249.229.992,00	93.31
		18.000.000

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	17.200.000,00	
4	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	228.029.992,00	
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	18.000.000,00
	JUMLAH	249.229.992,00	18.000.000

BELANJA PEMELIHARAAN

TAHUN 2023		TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	
943.582.027,00	691.427.535,00	73,28
		519.640.958

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	83.348.000,00	35.360.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	173.958.408,00	
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Compute Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	71.877.100,00 25.800.000,00 99.750.000,00 16.200.000,00 1.200.000,00 99.751.958,00 199.382.027,00 19.912.000,00 249.710.000,00	10.000.000,00 119.769.000,00 5.050.000,00 249.710.000,00 99.751.958,00
JUMLAH		249.229.992,00	519.640.958

PERJALANAN DINAS

TAHUN 2023		TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	
3.919.788.200,0	3.064.018.495,0	78.17
		2.724.339.265

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.994.532.695,00	2.531.587.303,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.310.000,00	79.490.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.175.800,00	5.980.000,00
JUMLAH		3.064.018.495,0	2.724.339.265

3.1.2.2 Belanja Modal

TAHUN 2023		%	TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI		
26.317.145.149,00	20.246.098.205,00	76.93	6.452.728.172,00

Belanja Modal pada Dinas Kelautan Dan Perikanan T.A. 2023 direncanakan sebesar **Rp. 26.317.145.149,00,-** dapat direalisir sebesar **Rp. 20.246.098.205,00,-** atau 76.93% terdapat siswa anggaran sebesar **Rp. 6.071.046.944,00,-** Realiasi T.A.2023 Bertambah **Rp. 13.793.370.033,-** dari realisasi T.A. 2022 sebesar **Rp. 6.452.728.172,-**

Rincian belanja Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2023	%	Realisasi	
				Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Belanja Tanah				
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	2.324.306.810,00	27.72	644.291.000,00	630.724.223
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	2.070.498.339,00	35.73	739.805.445,00	4.753.134.116
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.722.340.000,00	85.92	18.664.422.760,00	1.068.869.833
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	98.79	197.579.000,00	
Jumlah		26.317.145.149,00	76.93	20.246.098.205,00	6.452.728.172

3.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TAHUN 2023			TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	
2.324.306.810,00	644.291.000,00	27.72	630.724.323,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Modal Pengadaan alat besar	-	
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		344.456.500
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		199.000.023
4	Belanja Modal alat angkutan	37.500.000,00	-
5	Belanja Modal alat bengkel		-
6	Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga	308.246.000,00	-
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.625.000,00	-
8	Belanja modal pengadaan alat ukur		-
9	Belanja Modal alat laboratorium		8.275.000
10	Belanja modal pengadaan instalasi		-
11	Belanja modal Komputer	256.920.000,00	78.992.700
12	Belanja modal pengadaan konstruksi	-	-
13	Belanja modal buku pustaka	-	-
14	BM alat alat informasi	-	-
15	Belanja Modal Pengadaan keamanan	-	-
JUMLAH		644.291.000,00	630.724.223

3.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TAHUN 2023			TAHUN 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	
2.070.498.339,00	739.805.445,00	35.73	4.753.134.416,00

Rincian belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	586.243.585,00	4.753.134.116-
2	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	
3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	153.561.860,00-	
4	Belanja modal tugu titik kontrol/pasti	-	
5	Belanja Modal Pengadaan / Pembelian Konstruksi / Bangunan / Alat Informasi	739.805.445,00	4.753.134.116
Jumlah		739.805.445,00	4.753.134.116

3.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

TAHUN 2023		TAHUN 2022	
ANGGARAN	REALISASI	%	
21.722.340.000,00	18.664.422.760,00	85.92	1.068.869.833,00

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Jalan Irigasi dan jaringan		
2	Belanja modal jalan dan jembatan		776.400.000
3	Belanja modal bangunan air	18.646.682.510,00	
4	Belanja modal instalasi		292.469.833,
5	Belanja modal jaringan	17.740.250,00	
Jumlah		18.664.422.760,00	1.068.869.833

3.1.2.2.4 Belanja Modal asset lainnya

TAHUN 2023		TAHUN 2022	
ANGGARAN	REALISASI	%	
200.000.000,00	197.579.000,00	98.79	0

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Buku dan Perpustakaan	-	-
2	Belanja modal bahan perpustakaan	-	
3	Belanja modal asset tidak berwujud	197.579.000,00	
Jumlah		197.579.000,00	

3.1.3 PENDAPATAN – LO

Realisasi	
Tahun 2023	Tahun 2022
3.925.633.850,00	3.000.358.613,33

Terdapat selisih antara pendapatan LRA dan pendapatan LO sebagai berikut :

Pendapatan LRA	Rp. 2.823.054.450,00
Pendapatan hibah	<u>Rp.1.102.579.400,00</u>
Pendapatan LO	Rp. 3.925.633.850,00

Pendapatan-lo Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.925.633.850,00, Realisasi pendapatan-lo meningkat dari tahun sebelumnya, pendapatan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan Asli Daerah	3.925.633.850,00	3.000.358.613,33
2	Lain lain pendapatan yang sah		
Jumlah		3.925.633.850,00	3.000.358.613,33

Informasi tentang rincian dan penjelasan Pos pendapatan -LO yang terdiri dari:

NO	URAIAN	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan retribusi daerah	2.822.767.650,00	2.965.841.113,33
2	Lain lain PAD yang sah	286.800,00	34.517.500,00
3	Pendapatan hibah		
4	Pendapatan diterima dimuka		
JUMLAH		3.925.633.850,00	3.000.358.613,33

3.1.4 BEBAN– LO

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
119.712.482.799,11	126.461.461.004,97	(6.748.978.205,00)

Beban Dinas Kelautan dan Perikanan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 119.712.482.799,11.

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1.	Beban Operasi	67.347.094.738,38	72.026.259.752,67	(4.679.165.014,29)
2.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	52.365.388.060,73	54.435.201.252,30	(2.069.813.191,57)
	Jumlah	119.712.482.799,11	126.461.461.004,97	(6.748.978.205,86)

3.1.4.2 Beban Operasi

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
67.347.094.738,38	72.026.259.752,67	(4.679.165.014,29)

Beban Operasi Dinas Kelautan Dan Perikanan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 67.347.094.738,38. Beban operasi terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1.	Beban Pegawai	24.859.310.400	22.677.242.435	2.182.067.965,00
2.	Beban barang dan jasa	42.487.784.338,38	49.349.017.317,67	(6.861.232.979,29)
Jumlah		67.347.094.738,38	72.026.259.752,67	(4.679.165.014,29)

3.1.4.2.4 Beban Pegawai

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
24.859.310.400	22.677.242.435	2.182.067.965,00

Beban Pegawai pada Dinas Kelautan Dan Perikanan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **24.859.310.400,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	12.110.114.303,00	13.229.134.359,00	(1.119.020.056)
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	12.749.196.097,00	9.448.108.076,00	3.301.088.021
Jumlah		24.859.310.400,00	22.677.242.435,00	2.182.067.965

3.1.4.1.1 Beban Persediaan

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
31.109.121.478,50	38,696,150,387,00	(7.587.028.909)

Beban Persediaan merupakan nilai beban persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. **38,696,150,387,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/penurunan
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	399.002.542,5		399.002.542,5
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.277.431.000	807,720,850	469.710.150
3	Beban bahan baku	136.651.000		136.651.000
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.212.810.910	3,787,113,590	425.697.320
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.459.692.089	7.392.806.175,00	(4.944.462.876)
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	69.807.500	856,057,920	(786.250.420)
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		263,600,882	(263,600,882)
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	409.493.671	425,369,936	(15.876.265)
	Kertas dan Cover	96.846.769		96.846.769
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	183.048.800	879,801,830	(696.753.030)
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.597.000	3,312,000	285.000
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	85.461.948	78,056,500	7.405.448
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	33.622.000	109.743.600,00	(49.703.000)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.574.200	12,964,000	22.610.200
	Beban souvenir	17.100.000		17.100.000

15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	188.416.100	220.732.000,00	(58.733.900)
16	Beban Obat-Obatan-Obat		770,000	(770,000)
17	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	45.226.000	102.708.000	(57.482.000)
18	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.324.442.564	22.365.811.004	(2.041.368.440)
	Beban pakan	8.440.000		8.440.000
19	Beban Makanan dan Minuman Rapat	474.973.385	1.123.336.000	(648.362.615)
20	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	73.931.500	37.168.500	36.763.000
21	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		82.078.810.00	(82.078.810.00)
22	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.3400.000		3.3400.000
23	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	143.363.000		143.363.000
24	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	253.789.500		253.789.500
25	Belanja Pakaian KORPRI	143.000.000		143.000.000
26	Beban Pakaian Pelatihan Kerja			
27	Beban Pakaian Olahraga		135.650.000	(135.650.000)
28	Beban Komponen-Komponen Peralatan			
29	Beban Komponen-Komponen Lainnya			
	JUMLAH	31.109.121.478.50	38.696.150.387.00	(7.587.028.909)

3.1.4.1.2 Beban Jasa

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
7.210.197.926.00	7.319.175.270.67	(108.977.344)

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. **7,319,175,270.67** yang terdiri dari :

N o	Uraian	Tahun 2023	tahun 2022	Kenaikan/penurunan
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	121.550.000	282,000,000	(160.450.000)
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.128.000.000	2,501,600,000	626.400.000
3	Beban Jasa Tenaga Ahli	100.800.000	55,800,000	45.000.000
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	365.595.660	303,924,096	61.671.564
5	Beban Jasa Tenaga Keamanan	446.839.140	417,895,632	28.943.508
6	Beban Jasa Tenaga Caraka			
7	Beban Jasa Tenaga Supir	284.352.180	151,962,048	132.390.132
8	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	199.472.499	204,468,978.00	(4.996.479)
9	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.000.000		8.000.000
10	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	145.409.999		145.409.999
11	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.000.000	3,000,000.	
12	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		554,609,000	(554.609.000)
13	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	469.200.000	457,917,129.00	11.282.871
14	Beban Jasa Kalibrasi		71,429,000.00	(71,429,000)
15	Beban Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000	800,000.00	1.600.000
16	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.500.000	304,677,500	(303.177.500)
17	Beban Tagihan Telepon			
18	Beban Tagihan Air	13.538.250	6,152,610	7.385.640
19	Beban Tagihan Listrik	723.603.365	703,842,702	19.760.663
20	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			
21	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	86.668.201	80,638,555	6.029.646
22	Beban Paket/Pengiriman		1,680,000	(1.680.000)
23	Beban penambahan daya	7.500.000		7.500.000
24	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.482.440	23,237,500	(9.755.060)
25	Beban iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	217.466.700	180,958,654	36.508.046
26	Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	9.906.000	7,934,400	1.971.600
27	Beban iuran jaminan kematian kerja bagi non ASN	12.382.500	9,918,000	2.464.500
28	Beban Asuransi Barang Milik Daerah		4,387,717	(4,387,717)

29	Sewa Alat Bantu Lainnya	17.200.000		17.200.000
30	Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	628.330.992		628.330.992
31	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000	18,000,000.00	(14.000.000)
32	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			
33	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah		599,649,750.00	(599,649,750.00)
34	Beban jasa konsultasi spesialis-jasa pembuatan peta			
35	Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	200.000.000		200.000.000
36	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus		372,692,000.00	(372,692,000.00)
	Jumlah	7.210.197.926.00	7,319,175,270.67	(108.977.344)

3.1.4.1.3 Beban Pemeliharaan

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
666.384.988,00	719,022,985	(52.637.997)

Beban pemeliharaan merupakan nilai beban pemeliharaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar sebesar **719,022,985** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	tahun 2022	Kenaikan/penurunan
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	83.348.000	35,360,000.00	47.988.000
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	198.953.388		198.953.388
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	71.877.100	10,000,000.00	61.877.100
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.800.000		25.800.000
5	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumenasi-	199.594.500		

	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya			199.594.500
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih			
7	Beban pemeliharaan alat laboratorium -unit alat laboratorium-unit laboratorium lainnya		119,769,000.00	(119,769,000.00)
8	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	16.200.000	5,050,000.00	11.150.000
9	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.200.000		1.200.000
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya			
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		249,710,000.00	(249,710,000.00)
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II		99,751,958.00	(99,751,958.00)
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya		199,382,027.00	(199,382,027.00)
14	Beban Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya			
15	Beban Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	19.912.000		19.912.000
16	Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software	49.500.000		49.500.000
	Jumlah	666.384.988,00	719,022,985	(52.637.997)

3.1.4.1.4 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
3.457.983.945,00	2,825,827,465	632.156.480

Beban perjalanan dinas merupakan beban perjalanan dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2,825,827,465,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	tahun 2022	Kenaikan/penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.382.888.145	2,631,255,503	751.632.642
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap			
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.920.000	81,310,000	(13.390.000)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		5,980,000	(5,980,000)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.175.800	107,281,962	(100.106.162)
	Jumlah	3.457.983.945,00	2,825,827,465	632.156.480

3.1.4.1.5 Beban Penyusutan

Realisasi		Kenaikan/penurunan
Tahun 2023	Tahun 2022	
52.365.388.060,73	54.435.201.252,3	(2.069.813.191,57)

Beban penyusutan merupakan nilai beban penyusutan periode periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. **52.365.388.060,73** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023	tahun 2022	Kenaikan/penurunan
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.589.198.177,72	4.783.970.159,73	(1.194.771.982,01)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.095.596.655,80	40.027.240.861,40	68.355.794,40
3	Beban Penyusutan jalan,Irigasi, dan Jaringan	8.676.476.998,04	9.610.286.064,50	(933.809.066,46)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya			
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.116.229,17	13.704.166,67	(9.587.937,50)
	Jumlah	52.365.388.060,73	54.435.201.252,3	(2.069.813.191,57)

3.1.5 ASET

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.075.501.153.142,9	1.099.815.345.066,54

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara kerana alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Lancar	1.231.502.339,12	1.241.489.880,00
2	Aset Tetap	1.011.695.559.749,31	1.036.193.226.902,87
3	Aset Lainnya	62.574.091.054,50	62.380.628.283,67
Jumlah		1.075.501.153.142,9	1.099.815.345.066,54

3.1.5.1 Aset lancar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.231.502.339,12	1.241.489.880,00

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, piutang lainnya dan persediaan. Nilai Aset Lancar Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.231.502.339,12** dan **Rp. 1.241.489.880,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran		
2	Kas di Bendahara Penerimaan		
3	Uang muka pengadaan barang dan jasa	441.993.200,00	441.993.200,00
4	Assuransi dibayar dimuka		
5	Persediaan barang jasa	789.509.139,12	799.496.680,00
6	Persediaan barang modal		
Jumlah		1.231.502.339,12	1.241.489.880,00

3.1.5.1.1 Uang muka pengadaan barang dan jasa

Piutang lainnya dikarenakan adanya pekerjaan pengadaan kapal yang akan diserahkan ke masyarakat tidak dapat diselesaikan sampai dengan tgl 31 desember 2023 sedangkan penyedia/rekanan sudah mengambil uang muka sebesar Rp. 441.993.200,00. (Rincian terlampir)

3.1.5.1.2 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 789.509.139,12 (*daftar opname persediaan terlampir*). Pada Posisi 31 Desember 2023 terjadi penurunan saldo persediaan sebesar **Rp. 9.987.541,00** dari posisi persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 799.496.680,00**. Persediaan terdiri dari persediaan bahan pakai habis, bahan pakai habis adalah bahan yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan bahan pakai habis terdiri atas Alat Tulis Kantor (ATK), Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia		
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.422.950,00	3.436.400,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku		
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		
5	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	684.078.440,00	720.599.280,00
6	Persediaan Bahan Lainnya		
7	Persediaan Alat Tulis Kantor	39.313.300,00	61.121.000,00
8	Persediaan Kertas dan Cover	20.201.350,00	
9	Persediaan Bahan Cetak	7.850.000,00	2.300.000,00
10	Persediaan Benda Pos		
11	Persediaan Bahan Komputer	2.969.100,00	
12	Persediaan Perabot Kantor		
13	Persediaan Alat Listrik	405.000,00	
14	Persediaan Suvenir/Cendera Mata		
15	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.500.000,00
16	Persediaan Obat-obatan Lainnya	750.000,00	2.100.000,00
17	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		
18	pakan		8.440.000,00
19	Persediaan Makanan dan Minuman RapaT		
20	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.519.000,00	
21	Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
22	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)		

23	Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
24	Persediaan Pakaian KORPRI		
Jumlah		789.509.139,12	799.496.680,00

3.1.5.2 Aset Tetap

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.011.695.559.749,31	1.036.193.226.902,87

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.011.695.559.749,31 dan 2022 sebesar Rp. 1.036.193.226.902,87 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2023	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31 Desember 2023
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	TANAH	130.984.708.238,00	4.691.499.762		135.676.208.000
2	PERALATAN DAN MESIN	66.498.240.839,00	2.262.694.600	2.427.544.800	66.333.390.639
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.013.169.439.341,23	3.207.953.478	890163882	2.015.487.228.937,23
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	167.682.947.648,99	38.686.116.929	19.174.027.520	187.195.037.057
5	ASSET TETAP LAINNYA	1.689.587.000,00			1.689.587.000,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	355.828.339,00	131.127.000	211.214.889	275.740.450
7	AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET TETAP	(1.344.187.524.503,35)	(52.623.371.831,56)	(1.849.264.000)	(1.394.961.632.334,91)
	T O T A L	1.036.193.226.902,87	3.550.269.775,27	27.854.474.158	1.011.695.559.749,31

3.1.5.2.1 Tanah

Tanah Kantor

Tanah Kantor Merupakan nilai tanah kantor per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp. 130.984.708.238,00
Penyesuaian bertambah dari P3D	Rp. 4.691.499.762,00
Mutasi antar OPD	Rp.
Reklasifikasi	Rp.
Jumlah	Rp. 135.676.208.000,00

3.1.5.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp., 66.333.390.639,00 yang terdiri dari:

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1 Januari 2023	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2023		SALDO AKHIR 31 Desember 2023
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat-alat Besar	10.141.110.250,00			10.141.110.250,00
2	Alat-alat Angkutan	26.471.242.050,00	691.600.000	1.849.264.000	25.313.578.050
3	Alat Bengkel dan alat ukur	2.434.210.900,00	49.695.000		2.483.905.900
4	Alat Pertanian dan Peternakan	629.000.000,00			629.000.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	11.950.079.616,00	701.241.000	382.907.000	12.268.413.616
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	859.224.570,00	114.025.000	41.625.000	931.624.570
7	Alat kedokteran				
8	Alat Laboratorium	10.711.731.845,00	149.517.600	74.758.800	10.786.490.645
9	Alat Keamanan/persenjataan	6.999.850,00			6.999.850,00
10	Komputer	2.845.505.580,00	556.616.000	78.990.000	3.323.131.580
11	Alat eksplorasi				
12	Alat keselamatan kerja	412.361.500,00			412.361.500,00
13	Rambu rambu	36.774.687,00			36.774.687,00
	T O T A L	66.498.240.839,00	2.262.694.600	2.427.544.800	66.333.390.639

3.1.5.2.2.1 Alat-alat Besar

Alat-alat Besar Merupakan nilai Alat-alat berat per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	10.141.110.250,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Penghapusan	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	10.141.110.250,00

3.1.5.2.2.2 Alat-alat Angkutan

Alat-alat Angkutan Merupakan nilai Alat-alat angkutan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	26.471.242.050,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	37.500.000,00
Mutasi antar OPD	Rp.	262.100.000,00
Utang modal	Rp.	392.000.000,00
Mutasi antar OPD (-)	Rp.	(1.542.580.000,00)
Penghapusan (-)	Rp.	(306.684.000,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	25.313.578.050,00

3.1.5.2.2.3 Alat-alat Bengkel dan alat ukur

Alat-alat bengkel Merupakan nilai Alat-alat bengkel per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	2.434.210.900,00
Realisasi belanja modal TA 2023	Rp.	
Reklasifikasi	Rp.	49.695.000,00
Penghapusan	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	2.483.905.900,00

3.1.5.2.2.4 Alat-Alat Pertanian dan Peternakan

Alat-alat Pertanian dan Peternakan Merupakan nilai Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	629.000.000,00
Penghapusan	Rp.	
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	629.000.000,00

3.1.5.2.2.5 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan rumah tangga Merupakan nilai Alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	11.950.079.616,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	308.246.000,00
Utang modal	Rp.	364.411.000,00
Reklasifikasi	Rp.	28.584.000,00
Pembayaran utang tahun sebelumnya	Rp.	(168.982.000,00)
reklasifikasi	Rp.	(173.079.000,00)
Reklasifikasi ke Belanja Operasional	Rp.	(40.846.000,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	12.268.413.616,00

3.1.5.2.2.6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi dan pemancar

Alat-alat studio dan komunikasi Merupakan nilai Alat-alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	859.224.570,00
Realisasi belanja modal TA 2023	Rp.	41.625.000,00
reklasifikasi	Rp.	72.400.000,00
Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	Rp.	(41.625.000,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	931.624.750,00

3.1.5.2.2.7 Alat Laboratorium

Alat laboratorium merupakan nilai Alat laboratorium per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	10.711.731.845,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Utang Modal	Rp.	74.758.800,00
reklasifikasi	Rp.	74.758.800,00
Reklasifikasi	Rp.	(74.758.800,00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	10.786.490.645,00

3.1.5.2.2.8 Alat persenjataan

Alat keamanan merupakan nilai Alat keamanan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	6.999.850,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	,00
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	6.999.850,00

3.1.5.2.2.9 Komputer

Alat komputer merupakan nilai Alat komputer per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	2.845.505.580,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	256.920.000,00
Utang Modal	Rp.	213.846.000,00
reklasifikasi	Rp.	85.850.000,00
Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	Rp.	(15.540.000,00)
Reklasifikasi	Rp.	(63.450.000,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	3.323.131.580,00

3.1.5.2.2.10 alat keselamatan kerja

Alat keselamatan merupakan nilai Alat keselamatan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	412.361.500,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	,00
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	412.361.500,00

3.1.5.2.2.10 Rambu - rambu

Alat rambu rambu merupakan nilai Alat rambu rambu per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :		
Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	36.774.678,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	,00
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	36.774.678,00

3.1.5.2.3 Gedung dan Bangunan

3.1.5.2.3.1 Bangunan Gedung

Bangunan gedung merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	2.008.357.996.738,58
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	586.243.585,00
Utang modal	Rp.	642.754.090,00
Hibah	Rp.	1.102.579.400,00
Reklasifikasi	Rp.	722.814.543,00
Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	Rp.	(39.273.729,00)
Reklasifikasi	Rp.	(829.965.543,00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	2.010.742.959.084,58

3.1.5.2.3.2 bangunan menara

bangunan menara merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	170.306.523,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	170.306.523,00

3.1.5.2.3.1 Tugu titik control/ pasti

Tugu titik control/pasti merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	4.441.326.079,65
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	153.561.860,00
Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	Rp.	(20.924.610,00)
Reklasifikasi	Rp.	
Reklasifikasi	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	4.573.963.329,65

3.1.5.2.4 Jalan, irigasi dan jaringan

3.1.5.2.4.1 Jalan dan Jembatan,

Jalan dan jembatan merupakan nilai jalan dan jembatan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	40.638.976.141,37
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Utang modal	Rp.	23.976.000,00
Reklasifikasi	Rp.	(23.976.000,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	40.638.976.141,37

3.1.5.2.4.2 bangunan air

Bangunan air merupakan nilai bangunan air per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	123.212.607.200,74
Realisasi belanja modal T.A 2023	Rp.	18.646.682.510,00
Utang modal	Rp.	487.179.446,00
Reklasifikasi	Rp.	19.095.053.845,00
Pembayaran Utang Tahun sebelumnya	Rp.	(49.600.000,00)
Reklasifikasi	Rp.	(18.883.838.956,00)
Jumlah Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	142.508.084.045,74

3.1.5.2.4.3 Instalasi

Instalasi merupakan nilai instalasi per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	2.730.989.656,88
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Reklasifikasi	Rp.	
Reklasifikasi	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	2.730.989.656,88

3.1.5.2.4.4 Jaringan

Jaringan merupakan nilai Jaringan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	1.100.374.650,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	17.740.250,00
Utang modal	Rp.	198.872.314,00
Reklasifikasi	Rp.	216.612.564,00
Reklasifikasi	Rp.	(216.612.564,00)
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	1.316.987.214,00

3.1.5.2.5.1 Bahan perpustakaan

Buku dan perpustakaan merupakan nilai buku dan perpustakaan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	1.378.801.000,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp.	1.378.801.000,00

3.1.5.2.5.4 tanaman

merupakan nilai tanaman per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	249.750.000,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Jumlah	Rp.	249.750.000,00

3.1.5.2.6 Aset Tetap Renovasi

Asset tetap renovasi merupakan nilai Aset tetap per 31 desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo awal 1 january 2023	Rp.	61.036.000,00
Realisasi belanja modal TA 2023	Rp.	,00
Jumlah	Rp.	61.036.000,00

3.1.5.2.7 Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP)

KDP merupakan nilai KDP per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	355.828.339,00
Reklasifikasi	Rp.	131.127.000,00
Reklasifikasi	Rp.	(211.214.889,00)
Jumlah	Rp.	275.740.450,00

3.1.5.2.8 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai aset tetap sebagai dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset.

NO	SKPD	SALDO AWAL 1 Januari 2023	Mutasi 01 jan s/d 31 des 2023		SALDO AKHIR 31 Desember 2023
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Tanah		-		
2	Peralatan Dan Mesin	(50.265.458.928,55)	(3.851.298.177,72)	(1.849.264.000,00)	(52.267.493.106,27)
2	Gedung dan Bangunan	(1.154.830.345.501,95)	(40.095.596.655,80)		(1.194.925.942.157,75)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(139.030.684.072,85)	(8.676.476.998,04)		(147.707.161.070,89)
4	Asset tetap lainnya	(61.036.000,00)			(61.036.000,00)
	Asset yg dihapuskan				
5	Peralatan mesin				
6	Jalan irigasi jaringan				
	Jumlah	(1.344.187.524.503,35)	(52.623.371.831,56)	(1.849.264.000,00)	(1,394,961,632,334,91)

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2023 sebesar **(1,394,961,632,334,91)** terdiri dari :

3.1.5.2.6.1 Penyusutan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin merupakan nilai Penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	(Rp.	50.265.458.928,55)
Mutasi bertambah		
Belanja Modal / Beban Penyusutan	(Rp.	3.589.198.177,72)
Mutasi antar opd	(Rp.	262.100.000,00)
Mutasi berkurang		
Mutasi antar opd	(Rp.	1.542.580.000,00)
Penghapusan	(Rp.	306.684.000,00)
Jumlah		(Rp. 52.267.493.106,27)

3.1.5.2.6.2 Penyusutan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan nilai penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	(Rp. 1.154.830.345.501,95)
Mutasi bertambah	
Belanja Modal / Beban Penyusutan	(Rp. 40.095.596.655,80)
Jumlah	(Rp. 1.194.925.942.157,75)

3.1.5.2.6.3 Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan nilai Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	(Rp. 139.030.684.072,85)
Mutasi bertambah	
Belanja Modal / Beban Penyusutan	(Rp. 8.676.476.998,04)
Reklasifikasi	(Rp.)
Jumlah	(Rp. 147.707.161.070,89)

3.1.5.2.6.4 Penyusutan Aset tetap lainnya

Asset tetap lainnya merupakan nilai Penyusutan asset tetap lainnya per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	(Rp. 61.036.000,00)
Mutasi bertambah	
Belanja Modal / Beban Penyusutan	(Rp.)
Mutasi berkurang	
Lainnya	(Rp.)
Jumlah	(Rp. 61.036.000,00)

Koreksi lebih saji (*overstatement*) atas saldo awal akumulasi penyusutan asset tetap terjadi karena adanya.....

3.1.5.2.7 aset lainnya

3.1.5.2.7.1 kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan nilai asset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp. 61.472.838.260,00
Reklasifikasi	Rp. 6.803.208.067,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.
Jumlah	Rp. 68.276.046.327,00

3.1.5.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan nilai asset tak berwujud per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp. 279.937.500,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp. 197.579.000,00
Reklasifikasi	Rp. 197.579.000,00
Reklasifikasi	Rp. (197.579.000,00)
Jumlah	Rp. 477.516.500,00

3.1.5.3.2 Asset lain lain

asset lain lain merupakan nilai asset lain lain per 31 desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	8.987.234.267,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	
Reklasifikasi	Rp.	(6.803.208.067,00)
Jumlah	Rp.	2.184.026.200,00

3.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah yang terdiri dari :

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kewajiban Jangka Pendek	18.490.237.089	3.292.285.827,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang		
3.	Pendapatan diterima dimuka	16.666.666,67	16.666.666,67
	Jumlah	18.506.903.755,67	3.308.952.493,67

3.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

NO	URAIAN	TOTAL UTANG	KET. SUMBER DANA
(1)	(2)	(4)	(5)
I	Utang gaji dan tunjangan	973.025.352	
	Utang tambahan penghasilan pegawai	973.025.352	APBD
II	UTANG BARANG DAN JASA	2,082,051,935.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.693.600	APBD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.753.400	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.999.800	APBD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	418.000	APBD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.250.000	APBD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.776.000	APBD
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.250.300	APBD

	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	199.766.145	APBD
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan/Bibit Tanaman	1.226.242.100	APBD
	Utang Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	477.386.669	APBD
	Utang Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.650.000	APBD
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	11.438.122.614	APBD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.840.240	APBD
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.680.000	APBD
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.540.000	APBD
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	30.466.305	APBD
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	37.236.595	APBD
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	23.696.015	APBD
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO	99.622.499	APBD
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	41.545.714	APBD
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	269.400.000	APBD
	Utang Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000	APBD
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.301.000	APBD
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	24.994.980	APBD
	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-software	49.500.000	APBD
	Utang belanja pemeliharaan alat laboratorium kalibrasi	99.844.500	APBD
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	488.023.650	APBD
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.430.000	APBD

	Utang Beban Jasa Air	536.000	APBD
	Utang beban jasa listrik	57.430.411	APBD
	Utang beban jasa kawat/faksimili/internet	3.017.550	APBD
	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	392.000.000	APBD
	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	310.945.000	APBD
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.950.000	APBD
	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	74.758.800	APBD
	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	195.346.000	APBD
	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-	18.500.000	APBD
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.951.000	APBD
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	405.210.187	APBD
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	45.200.000	APBD
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	178.392.903	APBD
	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	23.976.000	APBD
	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	155.356.524	APBD
	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	256.822.922	APBD
	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	198.872.314	APBD
	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	75.000.000	APBD
	Utang belanja mebel	3.516.000	APBD
	TOTAL	18.490.237.089	

3.1.7 EKUITAS

31 Desember 2023	31 Desember 2022
985.411.043.385,76	1.025.178.825.405,87

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas - LPE

Ekuitas merupakan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 januari 2023	Rp.	1.025.178.825.405,87
Surplus/Defisit LO T.A. 2023	Rp.	(111.095.349.187,11)
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Mendasar :		
- Rekening konsolidasi	Rp.	71.327.567.167,00
- Koreksi asset lancar	Rp.	
- Koreksi penyusutan asset tetap	Rp.	
-		

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan -

Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	71.327.567.167,00
Jumlah Ekuitas - LPE	Rp.	985.411.043.385,76

RK PPKD

Saldo Awal 1 januari 2022	Rp.	71.327.567.167,00
Penerimaan RK PPKD		
- SP2D-LS	Rp.	67.804.378.481,00
- SP2D UP/GU/TU	Rp.	<u>7.250.492.835,00</u>
Jumlah Penerimaan RK PPKD	Rp.	75.054.871.316,00
Pengeluaran RK PPKD		
- Penerimaan Setoran Pendapatan		
SKPD	Rp.	2.823.054.450,00
- Pengembalian Sisa Kas	Rp.	648.086.226,00
- Mutasi antar opd	Rp.	
Jumlah Pengeluaran RK PPKD	Rp.	(3.471.140.676,00)
Jumlah RK PPKD	Rp.	71.583.206.001,50
Jumlah Ekuitas Akhir Neraca	Rp.	1.056.994.249.387,26

3.2 Pengungkapan Atas Pos Pos Asset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

3.2.1 Persedian

Pada persedian menggunakan 2 (dua) Pendekatan yaitu Pendekatan Aset dan Pendekatan Beban

3.2.2 Koreksi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi berkurang saldo awal penyusutan sebesar Rp. -.

3.2.2 Amortisasi

Tahun 2022 belum melakukan Amortisasi pada Aset tak Berwujud.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut (pergub 73 tahun 2018 tgl 19 january 2018), maka Dinas Kelautan Dan Perikanan didukung oleh ketersediaan sumberdaya berupa Pejabat Struktural Bagian tersebut adalah :

1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, meliputi;
 - a. *Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian Dan Hukum*
 - b. *Sub. Bagian Program*
 - c. *Sub. Bagian Keuangan*
 3. Bidang Pengelolaan dan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 4. Bidang Perikanan tangkap;
 5. Bidang perikanan budidaya dan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
 6. Bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
 7. Jabatan fungsional.
8. Berdasarkan peraturan gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 36 tahun 2018, dibentuk UPT wilayah masing-masing ;
- *UPT pelabuhan perikanan wilayah I, kelas A berkedudukan di kab bone, yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada kab bone, kab maros, kab pangkajene kepulauan, kab barru, kab pinrang, kab wajo, kab luwu, kab luwu utara, kab luwu timur, kota palopo dan kota pare pare;*
 - *UPT pelabuhan perikanan wilayah II, kelas A berkedudukan di kab bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada kab bulukumba, kab gowa, kab takalar, kab jeneponto, kab bantaeng, kab sinjai, kab kepulauan selayar dan kota Makassar*
- Susunan organisasi UPT terdiri dari;
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian tata usaha;
 - c) Seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - d) Seksi tata kelola dan pelayanan usaha; dan
 - e) Kelompok jabatan fungsional
8. Berdasarkan pergub nomor 3 tahun 2018 dibentuk cabang dinas kelautan, masing-masing:
- a. Cabang dinas kelautan kepulauan selayar, kelas A berkedudukan di kab selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab kepulauan selayar;
 - b. Cabang dinas kelautan pangkajene dan kepulauan, kelas A berkedudukan di kab pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab kepulauan pangkajene dan kepulauan;

- c. Cabang dinas kelautan luwu raya, kelas A berkedudukan di kota palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan kota palopo, kab luwu, kab luwu timur, kab luwu utara, kab tana toraja, dan kab toraja utara;
- d. Cabang dinas kelautan ajatappareng, kelas A berkedudukan di kota pare-pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab barru, kota pare-pare, kab pinrang, kab sidrap, dan kab enrekang;
- e. Cabang dinas kelautan bosowasi, kelas A berkedudukan di kab bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab bone, kab soppeng, kab wajo, dan kab sinjai;
- f. Cabang dinas kelautan wilayah selatan, kelas A berkedudukan di kab bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan kab jeneponto, kab bantaeng, dan kab bulukumba;
- g. Cabang dinas kelautan mamminasata, kelas A berkedudukan di kab gowa yang meliputi wilayah pelayanan kota Makassar, kab maros, kab gowa, kab takalar;

Susunan organisasi cabang dinas, terdiri dari:

- a. Kepala cabang dinas;
- b. Sub bagian tata usaha;
- c. Seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- d. Seksi penataan dan pengelolaan kawasan perairan; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

- 9. Peraturan gubernur no 35 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis perikanan budidaya air payau/laut. Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Seksi produksi;
 - d. Seksi pelayanan teknologi dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- 10. Peraturan gubernur no 37 tahun 2018, tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis balai penerapan mutu produk perikanan. Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian tata usaha;
 - c. Seksi standarisasi mutu;
 - d. Seksi pengembangan produk; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan analisis data yang terkait dengan dukungan Sumberdaya Manusia terhadap Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas saat ini, maka diketahui bahwa kuantitas dan kualitas aparatur cukup memadai dalam mendukung upaya pencapaian visi, misi dan program kerja tahunan Dinas Kelautan Dan Perikanan. Meskipun disadari bahwa untuk ekselerasi pencapaian *outcomes* kegiatan masih diperlukan sentuhan pembinaan terhadap aparatur yang berada pada level eselon II sampai IV serta seluruh staf Dinas Kelautan Dan Perikanan khususnya pada aspek teknis fungsional.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki hingga akhir Tahun 2017 dapat dikatakan masih belum memadai utamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas yang berjumlah kegiatan.

Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan maka upaya pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kerja melalui kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Dinas tetap menjadi salah satu skala prioritas disamping kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan Publik.

4.2 Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Di mana Disebutkan Dalam Pasal 115 Adalah Sebagai Berikut : " Dinas Kelautan Dan Perikanan Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 2,Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Urusan Dibidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Asas Disentralisasi,Dekonstrasi Dan Tugas Pembantuan.

4.3 Sumber Daya SKPD

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan per 31 desember 2023 sebanyak 182 (*Seratus Delapan Puluh Dua Orang*) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) , adapun rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualifikasi :

Berdasarkan Kepangkatan :

- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| a. Golongan IV sebanyak | = | 42 Orang |
| b. Golongan III sebanyak | = | 128 Orang |
| c. Golongan II sebanyak | = | 10 Orang |
| d. Golongan I sebanyak | = | 2 Orang |
- e. Jumlah pegawai NON ASN yang ada pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan per 31 desember 2023 sebanyak 137 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh*) orang Non ASN , adapun rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualifikasi :

1. *Tenaga administrasi 110 orang*

2. *Tenaga supir 13 orang*

3. *Tenaga keamanan 7 orang*

4. *Tenaga kebersihan 7 orang*

4.4 Visi dan Misi

1. Visi

Pembangunan Sulawesi Selatan Merupakan Gambaran Kesuksesan Yang Ingin Di Capai Dalam Kurun 5 Tahun Kedepan Yang Disusun Dengan Memperhatikan RPJPD 2008 – 2028 Sulawesi Selatan,Substansi RPJM Nasional, Dinamika Lingkungan Stategis,Aspirasi Masyarakat Dan Pemerintah Sulawesi Selatan,Serta Visi Misi Gubernur/Wakil Gubernur.

Untuk Itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan 5 Tahun Pertama RPJMD 2013 – 2018 Adalah : “ **Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional** ”

Pilar Utama Pembangunan Nasional Adalah Gambaran tentang Possisi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2018 Yang Menjadi Acuan Dan Berkonstribusi Nyata Terhadap solusi Persoalan Mendasr Bangsa Indonesia.Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional Dan Juga Sebagai Simpul Jejaring Akselerasi Kesejatraan.

Simpul Jejaring Adalah Gambaran Tentang Posisi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2018 Yang Semakin Menempatkan Dirinya Sebagai Pusat Pertumbuhan Dan Perkembangan Luar Pulau Jawa,Pusat Pelayanan Barang Dan Jasa,Interkoneksi (Hub Pendidikan,Hub Kesehatan,Serta Hub perhubungan Darat,Laut Dan Udara).

Akselerasi Kesejatraan Adalah Gambaran Tentang Proses Dan Hasil Perubahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Melalui Pengelolaan Keragaman Modal Manusia,Sosial,Budaya,Alam,Fisik,dan Finansial Sehingga Dapat Mempercepat Perwujudan Kemakmuran Ekonomi,Kesejahteraan Sosial Dan Kelestarian Lingkungan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan.

2. Misi

Adapun Misi Pembangunan Daerah Ada 7 (Tujuh),Yaitu:

1. Mendorong Semakin Berkembangnya Masyarakat Yang Religius Dan Kerukunan Intra Dan Antar Ummat Beragama.
2. Meningkatkan Kualitas Kemakmuran Ekonomi,Kesejahteraan Sosial Dan Kelestarian Lingkungan;
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan,Kesehatan Dan Infrastruktur;
4. Meningkatkan Daya Saing Daerah Dan Sinergitas Regional,Nasional Dan Global;
5. Meningkatkan Kualitas Demokrasi Dan Hukum;
6. Meningkatkan Kualitas Ketertiban,Keamanan,Harmoni Sosial Dan Kesatuan Bangsa
7. Meningkatkan Perwujudan Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih

“ Terdepan Penggerak Perekonomian Sulawesi Selatan ”

Adapun misi Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013 – 2018 Adalah Sebagai Berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
 2. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan
 3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan Perikanan
 4. Mengembangkan SDM kelautan dan perikanan dan tata pemerintahan yang baik dan bersih
- Untuk Mewujudkan Ke 4 (empat) Misi Tersebut,Nilai – Nilai agama dan Budaya Daerah Dijadikan Dasar Pelaksanannya Dengan Senantiasa Melaksanakan Prinsip – Prinsip Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik,sebagai Berikut :

- a) Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan)
- b) Integriti (Integritas)

- c) Qualiti And Accountability (Mutu Dan Akuntabilitas)
- d) Pemerataan Pembangunan Yang Berkadilan
- e) Penggunaann Data Dan informasi yang Terintegritas.

4.5 Program dan Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan pembangunan daerah dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan penetapan sasaran tersebut diatas, maka pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan program sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan aparatur kelembagaan yang terdiri dari beberapa kegiatan.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2021 yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan ini yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri

dari beberapa sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2022 meliputi 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2023 meliputi beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
 - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2021 meliputi beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

V. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2021 meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

VI. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini pada tahun anggaran 2021 meliputi beberapa kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

BAB V
PENUTUP

Catatan Laporan Keuangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan,sasaran, program dan kegiatan Satuan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terperinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023

Makassar, 06 february 2024.

KEPALA DINAS
Kelautan Dan Perikanan

Dr. M. ILYAS, ST.,M.Sc
N I P : 19700606 199603 1 006